

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Ali, Hamzah. (1996). *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sutiyo. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Bernard Arief Sidharta. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Fatkhurohman. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshidiqie. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshidiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Isharyanto. & Aryoko Abdurrachman. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*. Jakarta: Moeka Publishing.
- Mahfud M. D. (2012). *Demokrasi Lokal : Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Manullang. (1983). *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pembangunan.
- Miriam Budiardjo. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.

- Maruarar Siahaan. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar. & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ratno Lukito. (2016). *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori Dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim. Peter. & Yenny Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2023). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti. & Iwan Satriawan. (2009). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjahjo Kumolo. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.
- Sri Soemantri Martosoewignjo. (1993). *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, 30 Tahun Kembali Ke UUD1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sudikno Mertokusumo. & A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.

Yogyakarta: Liberty.

B. Jurnal dan Skripsi

Agus Hadiawan. (2009). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*. Volume 3, Nomor 7.

Andi Desmon. (2018). Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila. *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 3, Nomor 2.

Bisariyadi. dkk. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9, Nomor 3.

Diyar Ginanjar Andiraharja. (2021) Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Khazanah Hukum*. Volume 3 Nomor 2.

Fajar Kuala Nugraha. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Transformative*. Volume 2, Nomor 1.

- Gulam Imaaduddin. (2021). Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hamdan Zoelva. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10, Nomor 3.
- Haryanti, H Budiman. (2022). Mewujudkan Nilai Demokrasi Rasional Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Serentak Di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Volume 13, Nomor 1.
- Muhammad Fariz Amrullah. (2021). Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Nurul Qamar. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 1, Nomor 1.
- R.M. Ananda. B. Kusuma. (2005). Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita. *Jurnal Konstitusi*. Volume 1, Nomor 3.
- Rosiatul Janani. (2019). Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Hasil Pilkada. *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Trisna Muhammad Rofiqi. (2022). Peranan Hati Nurani Hakim dalam Persidangan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. Volume 1, Nomor 1.

Ulya Ardhia Cahyani Ahmad. (2022). Pengadilan Khusus Sengketa hasil Pilkada: kajian terhadap Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. *Thesis*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Violla Reininda. (2021). Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Volume 3, Nomor 1.

Yuni Septiani. (2020). Analisis kualitas layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru). *Jurnal Teknologi Dan Open Source*. Volume 3, Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. Internet

Indonesia Baik. (2023). <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-indonesia>. Diakses Pada Tanggal 24 April 2024 Pukul 13:23 WIB.

